

Judul : B50 jangkau 6.050 SPBU, ketergantungan impor solar mulai berkurang
Tanggal : Sabtu, 12 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

B50 Jangkau 6.050 SPBU

Ketergantungan Impor Solar Mulai Berkurang

SENAYAN menyambut baik perkembangan penerapan biodiesel B50 yang telah disalurkan di 6.050 dari total 6.412 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) penyalur Biosolar. Perluasan tersebut menunjukkan kebijakan kemandirian energi mulai berjalan secara nyata hingga ke tingkat konsumen.

Anggota Komisi XII DPR Jamaludin Malik mengatakan, penerapan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, menghemat devisa, dan mengoptimalkan sumber energi yang tersedia di dalam negeri. Capaian tersebut merupakan perkembangan positif, tetapi penyelesaian transisi di seluruh wilayah tetap perlu dikawal.

Namun, Jamaludin mengimbau, Pemerintah bersama Pertamina dan badan usaha terkait perlu memastikan 362 SPBU yang masih berada dalam masa transisi dapat segera menyalurkan B50. Terlebih waktu relaksasi penghabisan stok B40 berakhir pada 30 September 2026. "Transisi menuju B50 perlu diselesaikan secara tertib dan merata," kata Jamaludin di

Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga mencatat, implementasi Biosolar dengan campuran biodiesel 50 persen atau B50 telah mencapai 94 persen atau di 6.050 dari total 6.412 SPBU per 5 September 2026. Selanjutnya, berdasarkan data Kementerian ESDM, penyaluran B50 sejak Juli hingga 7 September 2026 telah mencapai sekitar 3,4 juta kiloliter.

Secara keseluruhan, penyaluran biodiesel sepanjang 2026 mencapai sekitar 10,69 juta kiloliter. Rinciannya, penyaluran B40 sekitar 7,27 juta kiloliter dan B50 sekitar 3,4 juta kiloliter. Dari 104 titik serah biodiesel, sebanyak 76 titik telah menyalurkan B50, sedangkan 28 titik lainnya masih berada dalam masa transisi.

Jamaludin melanjutkan, jang-an sampai masih terdapat daerah yang tertinggal karena persoalan terminal, fasilitas pencampuran, distribusi, ataupun kesiapan SPBU. Karena ketersediaan energi yang merata merupakan bagian penting dari keadilan energi.

Selain itu, ia menyambut baik



Jamaludin Malik

hasil pengujian B50 pada alat berat pertambangan selama 1.000 jam yang dilaksanakan sekitar enam bulan pada tiga perusahaan tanpa ditemukan kendala berarti. Begitu juga dengan pengujian sejumlah kendaraan telah mencapai 50 ribu kilometer. Sementara kendaraan berspesifikasi lama dapat mencapai 37 ribu kilometer sebelum memerlukan penggantian filter.

"Tapi hasil pengujian tersebut perlu diperkuat dengan riset dan pengembangan berkelanjutan, pengawasan standar mutu, serta pemantauan terhadap kinerja mesin dalam jangka panjang,"

saran politisi Golkar ini.

Yang penting, harap Jamaludin, penerapan B50 bisa memberikan manfaat ekonomi yang semakin besar bagi petani sawit, koperasi, industri pengolahan, dan tenaga kerja nasional dengan tetap menjaga keberlanjutan bahan baku. Karena itu, B50 perlu dibangun sebagai bagian dari ekosistem energi nasional yang kuat, bukan hanya program pencampuran bahan bakar.

"Jika mutu, pasokan, distribusi, kesiapan teknologi, dan keberlanjutan bahan bakunya terus dijaga, kebijakan Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil ini dapat menjadi fondasi penting menuju swasembada energi sekaligus memperkuat industri nasional," harap legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Sementara, Wakil Ketua Komisi XII DPR Donny Oekoen meminta Pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga mengantisipasi potensi *bottleneck* atau leher botol dalam sistem logistik energi seiring implementasi program B50. Kesiapan infrastruktur dan penguatan sistem pengendalian mutu dinilai menjadi kunci agar peningkatan bauran biodiesel

tidak mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Donny menjelaskan, implementasi B50 yang mulai diberlakukan sejak 1 Juli 2026 membawa konsekuensi terhadap kebutuhan fasilitas blending, terminal, tangki penyimpanan, transportasi, dan distribusi. Terlebih, alokasi biodiesel 2026 mencapai sekitar 15,65 juta kiloliter. "Ini menunjukkan besarnya volume yang harus ditangani oleh sistem logistik energi nasional," ujar dia di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Karena itu, Donny meminta gambaran menyeluruh mengenai kapasitas *blending* nasional dan kapasitas yang digunakan PT Pertamina Patra Niaga. Termasuk tingkat utilisasi fasilitas, kapasitas storage, jumlah titik blending dan titik serah, hingga kebutuhan investasi tambahan.

Menurutnya, berbagai aspek tersebut perlu dipastikan agar peningkatan penggunaan biodiesel tidak justru menimbulkan *bottleneck* yang berujung pada terganggunya ketersediaan Biosolar maupun meningkatnya biaya distribusi dan harga energi yang pada akhirnya membebani masyarakat. ■ TIF